

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain lemahnya penerapan *corporate governance*. Salah satu akar yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki oleh swasta (Barid, 2000). Teori keagenan (*agency theory*) mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal itu dikarenakan bagi pihak internal (manajemen) pentingnya laporan keuangan perusahaan untuk menunjukkan prestasi hasil kerja mereka dan menunjukkan kondisi yang baik terhadap pihak eksternal walaupun kondisi perusahaan sedang tidak baik sebagai tujuan untuk mempertahankan para investor agar tetap melakukan investasi kepada perusahaan, sedangkan pentingnya laporan keuangan bagi pihak eksternal (investor, kreditor, pemilik, pemerintah, masyarakat) selaku pemakai laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada saat ini sehingga dapat memprediksikan kondisi perusahaan masa depan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Lebih banyaknya informasi

yang dimiliki *agent* dibanding *principal* dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Gitman (2012) *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan.

Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang digunakan *principal* untuk memberikan insentif kepada *agent*. *Agent* yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan informasi yang kurang menguntungkan, sehingga menimbulkan informasi yang tidak simetris. Adanya perilaku oportunistik dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*, misalnya manakala manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*. Manajer dituntut untuk mengambil keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan, namun demikian pemegang saham tidak dapat mengawasi semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Satu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer bukan tidak mungkin dapat

mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan yang dapat berakhir pada kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Krisis tersebut terjadi antara lain disebabkan ketidak mampuan perusahaan mengantisipasi *financial distress* pada perusahaannya, sehingga perusahaan tersebut menjadi bangkrut. *Financial distress* sendiri merupakan kondisi dimana perusahaan tidak dapat melanjutkan eksistensinya dalam bentuknya saat ini, seperti kebangkrutan, *delisting*, atau restrukturasi keorganisasian perusahaan secara besar-besaran (Muller *et al.*, 2009). Penyebab terjadinya *financial distress* disebabkan oleh dua isu penting, yaitu : a. ketidak mampuan lembaga kredit dan kreditor keuangan untuk mengantisipasi dan mencegah situasi *financial distress*; dan b. pentingnya efektivitas dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam konteks ini (Husson-Traore, 2009).

Menurut Brigham dan Daves, (2003) kesulitan keuangan terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan. *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi *financial distress* ini diketahui, diharapkan dapat

dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi.

Diperlukan analisis untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan. Salah satu analisis yang dilakukan yaitu berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dimana masalah tentang keagenan biasanya berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan yang bersangkutan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

Kepemilikan manajerial mampu mengurangi masalah keagenan atau *agency problem* yang timbul pada suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajemen (direksi atau komisaris) maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. Dalam mencapai tujuannya perusahaan masalah yang sering timbul yaitu *agency problem*, *agency problem* yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham atau pemilik perusahaan, dimana manajer akan berusaha untuk meningkatkan kepentingan pribadi sedangkan pemegang saham mementingkan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai, namun *agency problem* yang muncul tergantung pada struktur perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajemen (direksi atau komisaris). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajemen maka semakin besar pula

tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. Keputusan yang lahir dari manajemen diharapkan merupakan keputusan bagi kepentingan perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan oleh manajer perusahaan termasuk yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris. Adanya kepemilikan manajerial menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan karena mereka akan berbagi konsekuensi dari keputusan tersebut (I Kadek dan Ni Made, 2019). Teori agensi menyarankan adanya mekanisme insentif untuk mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholders*. Manajemen tidak dapat berpikir seperti *stakeholders* apabila mereka tidak menjadi *stakeholder*. Manajemen seharusnya memiliki resiko keuangan sebagaimana resiko keuangan yang ditanggung *stakeholders* sehingga akan bertindak demi kepentingan terbaik *stakeholders*, sehingga kepemilikan saham oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pemenuhan kepentingan *stakeholder*. Dengan demikian perusahaan pun dapat terhindar dari potensi terjadinya *financial distress*.

Jenis kepemilikan lain yang ada dalam struktur kepemilikan perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah investor besar, selain orang perseorangan, yang melakukan kebijaksanaan atas investasi orang lain (Lang dan McNichols, 1997; Koh, 2003). Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari total saham beredar perusahaan. Institusi tersebut adalah bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor institusi lainnya.

Pemegang saham institusional tidak menargetkan kinerja jangka pendek atau tahunan, tetapi fokus pada jangka panjang dan membantu manajemen untuk meningkatkan kinerja jangka panjangnya (Donker, Santen dan Zahir, 2009).

Pemegang saham institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain diharapkan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan dan mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan dan kemakmuran para pemegang saham. Sehingga biaya agensi dapat diminimalkan, dan potensi terjadinya kesulitan keuangan atau *financial distress* dapat diminimalisir karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Selain itu jenis kepemilikan yang masuk dalam struktur kepemilikan yaitu kepemilikan keluarga (*family ownership*). Kepemilikan keluarga merupakan keterlibatan dan pengaruh keluarga terhadap perusahaan, Chen *et al.*, (2010), mendefinisikan kepemilikan keluarga yaitu, semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (Kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan perusahaan publik, Negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu anggota keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, non BUMN,

non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut. Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan jika sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non keluarga.

Banyak perusahaan secara substansial dimiliki oleh keluarga di mana anggota keluarga ini juga menjabat sebagai direktur, terutama direktur eksekutif. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga biasanya memiliki sistem pemantauan yang lebih baik, yang mengarah pada masalah keagenan yang lebih rendah (Fama dan Jensen, 1983).

Menurut Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer (1999) bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia merupakan struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana didominasi oleh perusahaan kepemilikan keluarga. Pemegang saham mayoritas dapat memegang kendali atas pengambilan keputusan oleh manajemen dan cenderung kurang dalam hal perlindungan hak pemegang saham minoritas. Sehingga *agency problem* yang muncul di Indonesia lebih kepada konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang berakibat pada kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Terdapat fenomena nyata di Indonesia dalam hal kesulitan keuangan pada periode 2015 PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) telah diberhentikan perdagangannya karena mendapatkan suspensi di bursa saham oleh BEI. PT

Berau Coal Energy Tbk (BRAU) berada di pasar modal pada 19 Agustus 2010. Perusahaan melepas 3,4 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp 400 per lembar. Permasalahan yang dialami PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yaitu tidak melakukan penyerahan laporan keuangan. Hal tersebut ternyata dikarenakan laba bersih BRAU terus menurun hingga meningkatnya beban penjualan dan selain menurunnya laba bersih, BRAU juga mengalami penurunan kinerja perusahaannya sejak 2013, bahkan pada Juli 2015 perseroan gagal melakukan pembayaran utang sebesar US\$ 450 juta yang jatuh tempo. Hingga pada tahun 2017 dalam media elektronik (detik.com, 2017) PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) resmi terhapus dari daftar perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten ini resmi *delisting* lewat informasi yang diumumkan BEI dengan surat No: Peng-DEL-00002/BEI.PP1/11-2017. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di pasar modal pada 19 Agustus 2010.

Adapun perusahaan lain yang mendapat suspensi di bursa sejak 2015 yaitu PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), yakni sejak Juni 2015. TKGA pertama kali diperdagangkan pada 6 Januari 1992 dengan harga penawaran Rp5.000. (hm), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) resmi *delisting* lewat informasi yang diumumkan BEI dengan surat No: Peng-DEL00006/BEI.PP2/11-2017. Sebelum dilakukannya *delisting* PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) diantaranya melalui penghentian sementara perdagangan efek TKGA pada 30 Juni 2015, penghapusan pencatatan efek TKGA pada 18 Oktober 2017, dan terakhir pencabutan penghentian sementara perdagangan efek hanya di pasar negosiasi pada 18 Oktober

2017 dan hingga akhirnya resmi terhapus dari daftar perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi tersebut dikarenakan perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum dan juga PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) belum menyerahkan laporan tahunan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan *financial distress* yang dialami perusahaan sehingga perusahaan belum dapat membayar *listing* tahunannya yang mengakibatkan saham PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA) kembali disuspensi pada akhir Januari 2017 hingga akhirnya dilakukan *delisting* oleh BEI (okezone.com, 2017). Penutupan terakhir saham TKGA, yakni sebesar Rp4.300.

Selain dua perusahaan diatas adapun perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pada periode 2012 PT ATPK Resources Tbk pertambangan, minyak bumi dan gas mengalami *financial distress*. Penyebab perusahaan tersebut mengalami *financial distress* adalah laba perusahaan tersebut tercatat negatif selama dua periode berturut-turut dan rasio profitabilitasnya negatif (Bursa Efek Indonesia). Dan pada tahun 2015 Saham PT ATPK Resources Tbk (ATPK) disuspensi sejak 28 Agustus 2015 dikarenakan belum mengumumkan laporan keuangan per 31 Maret 2015 (finance.detik.com). Terkait dengan belum diumumkannya laporan keuangan PT ATPK, terdapat indikasi adanya masalah dalam laporan keuangannya yang akan membuat nilai saham perusahaan menurun. Dan suspensi PT ATPK diperpanjang pada 2018 dikarenakan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan

tersebut pada 29 Juli 2018 (wartaekonomi.co.id, 2018). ATPK sendiri merupakan emiten pertambangan dan masuk bursa pada tanggal 17 April 2002 dengan harga penawaran Rp300 perlembar saham. Pada semester I 2018, ATPK membukukan pendapatan Rp42,9 miliar dan rugi bersih Rp34 miliar. Kondisi *financial distress* diperjelas dengan informasi tersebut dan juga kemungkinan penyebab penundaan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan kondisi tersebut. Kerugian PT ATPK membuatnya masuk dalam daftar *delisting* Bursa Efek Indonesia (BEI). Dikarenakan pada peraturan bursa jika sudah 24 bulan tidak diperdagangkan maka BEI berkuasa melakukan *delisting*. Sebelum dilakukannya *delisting*, pihak BEI memantau keberlangsungan usaha ATPK (okezone.com, 2018). BEI juga memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya di bawah pengawasan bursa dalam waktu terbatas. Terakhir, PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) akan kembali direview oleh BEI terkait perkembangan komitmen dari direksi perusahaan untuk kepastian keberlangsungan perusahaan.

Peneliti berpendapat bahwa data keuangan dan ekonomi sendiri tidak memberikan cukup kuat prediksi untuk kebangkrutan di masa mendatang, menjadi perlu untuk memasukan variable represntatif dari kepemilikan atau dari karakteristik tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkan model dalam memprediksi *financial distress* pada suatu perusahaan (Chang, 2009; Chen 2008; Fich dan Slezak, 2008).

Faktanya, pada tahun 1990-an terdapat penelitian-penelitian besar yang menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap *financial distress* maupun kebangkrutan pada perusahaan (Chang, 2009; Lajili dan Zegal, 2010). Dengan faktanya bahwa konflik kepentingan pada hubungan antara manajemen dengan pemangku kepentingan dengan peran delegasi, lebih buruk ketika masa krisis karena pihak manajemen akan memilih strategi jangka pendek yang menghasilkan penghasilan pribadi mereka, mengingat dengan kemungkinan manajer akan kehilangan pekerjaannya (Donker *et al.*, 2009). Prilaku manajer yang seperti ini akan membawa konflik etika dengan pihak pemegang saham karena pihak manajemen lebih memprioritaskan pemasukan pribadi dibandingkan tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan dimasa depan.

Terkait dengan *financial distress*, terdapat perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga masih diperhitungkan kembali penelitiannya. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa apabila manajemen memiliki kontrol pada perusahaan mereka dapat mengambil alih hak *stakeholders* tanpa khawatir akan kelangsungan kompensasi dan posisi mereka dalam perusahaan. Lajili dan Daniel (2010) menemukan bahwa *ownership structure*, signifikan menjadi penjelas prediksi kebangkrutan. Adapun peneliti lain (Wang dan Deng, 2006 ; Li dan Deng, 2008) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dengan kemungkinan terjadinya *financial distress*. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Donker *et al.*, (2009) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penemuan

tersebut didukung oleh Md-Rus *et al.*, (2013) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial oleh direktur memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

Dalam kaitannya tentang kepemilikan institusional, penelitian dilakukan oleh Li (2015) menemukan pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap *financial distress*. Dan dalam penelitian Wardhani (2007) ditemukan bahwa konsentrasi kepemilikan institusi keuangan menghasilkan nilai yang tidak signifikan, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Md-Rus *et al.*, (2013) dan Manzanque *et al.*, (2015) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional tidak memiliki dampak yang signifikan pada kemungkinan kesulitan keuangan suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang di temukan oleh Donker *et al.*, (2009) dan Shahab *et al.*, (2017) yaitu, memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Yang terakhir mengenai kepemilikan Keluarga, Donker *et al.*, (2009) menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Darus dan Mohamad (2011) bahwa struktur kepemilikan yang salah satunya adalah kepemilikan keluarga tidak signifikan dalam hal mengurangi kemungkinan kondisi *financial distress* perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Md-Rus (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Maury (2005) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga dapat membantu mengurangi permasalahan

agensi antara pemilik perusahaan dengan manajer pada suatu perusahaan, yang dapat berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Darus dan Mohamad (2011) struktur kepemilikan tidak dapat memengaruhi *financial distress* perusahaan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***”

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Terjadinya *agency problem* yang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal yang dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan.
2. Kedua belah pihak (internal dan eksternal) mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang digunakan mengenai keadaan perusahaan.
3. Adanya perilaku oportunistik dari pihak internal, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan eksternal atau para pemegang saham.
4. Ketidak mampuan perusahaan mengantisipasi *financial disress* pada perusahaannya, sehingga perusahaan tersebut menjadi bangkrut.

5. Terjadinya pengambilan keputusan yang tidak tepat, akan mengakibatkan *financial distress*.
6. Terjadinya masalah tentang keagenan biasanya berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk membatasi pembahasan yang cukup luas, serta keterbatasan waktu, materi dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Maka peneliti membatasi masalah ini sebagai berikut :

1. Ruang lingkup ini dibatasi hanya dengan meneliti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga.
2. Pengukuran *financial distress* pada penelitian ini menggunakan *Altman Z-score*, dengan kategori nilai kurang dari 2.99 ketika perusahaan mengalami *financial distress* dan sebaliknya.
3. Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki manajemen (direktur dan komisaris) dengan jumlah saham yang beredar.
4. Kepemilikan institusional diukur dengan presentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar.
5. Sedangkan kepemilikan keluarga dalam penelitian ini menggunakan variable dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga >5% dan bernilai 0 jika sebaliknya.
6. Data-data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan di bidang

pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial di Indonesia berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan institusional di Indonesia berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah kepemilikan keluarga di Indonesia berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial di Indonesia terhadap *financial distress*.
2. Pengaruh kepemilikan institusional di Indonesia terhadap *financial distress*.
3. Pengaruh kepemilikan keluarga di Indonesia terhadap *financial distress*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan antara lain :

1. Akademisi

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal ini mengenai struktur kepemilikan perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan. Selain itu penelitian yang memasukan kepemilikan keluarga sebagai salah satu ukuran tata kelola perusahaan terhadap *financial distress* perusahaan masih sedikit, biasanya ukuran penelitian yang sering dipakai adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan. Adanya berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu memberikan harapan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dalam hal ini mengenai struktur kepemilikan perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan.

2. Perusahaan

Terutama untuk perusahaan yang mengalami *financial distress*, dapat menjadi masukan mengenai tata kelola perusahaan dalam hal ini mengenai struktur kepemilikan yang berpengaruh untuk mengatasi kondisi *financial distress* pada perusahaan tersebut.

3. Pemegang saham / Investor

Dapat membantu pemegang saham untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan bahwa menerapkan tata kelola perusahaan merupakan faktor yang dapat dijadikan pertimbangan kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

